Tanggung Jawab Houthi yang Melakukan Perekrutan Anak sebagai Tentara dalam Konflik Bersenjata di Yaman Ditinjau dari Hukum Internasional

Rossy Novianty, Irawati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Rossynovianty5@gmail.com, ira.wati66@gmail.com

Abstract— Rebels or belligerents are regulated in several international conventions, belligerents are subjects of international law who are not countries where the group tries to fight for their rights or aspirations that cannot be fulfilled by the government of that country. In this study, the case taken regarding the recruitment of child soldiers by the Houthis, the recruitment of child soldiers is not only carried out by the State but also often occurs by the rebels. The recruitment of child soldiers is prohibited by several International Conventions. However, international legal arrangements place more emphasis on the responsibility of the State, while the practice of using child soldiers is more often carried out by the rebels. Recruitment of child soldiers is a crime in war, so hereby the Houthis can be held accountable for the act of recruiting child soldiers in accordance with Article 10 of the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts of 2001. In addition to that, it is also stated in Article 25 paragraph (3) of the 1998 Rome Statute and Article 28 letter (a) of the 1998 Rome Statute by applying individual responsibility and command responsibility.

Keywords— Belligerent, Recruiting Child Soldiers, Houhti, Responsibilities

Abstrak— Pemberontak atau belligerent diatur pada beberapa Konvensi Internasional, belligerent adalah subjek hukum internasional yang bukan Negara dimana kelompok tersebut mencoba untuk memperjuangkan haknya atau aspirasinya yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah Negara tersebut. Dalam penelitian ini kasus yang diambil mengenai perekrutan tentara anak oleh Houthi, perekrutan tentara anak bukan hanya dilakukan oleh Negara namun juga kerap terjadi oleh kaum – kaum pemberontak. Perekrutan tentara anak dilarang oleh beberapa Konvensi – Konvensi Internasional. Namun pengaturan hukum internasional lebih menekankan pada tanggung jawab Negara, sedangkan praktik penggunaan tentara anak lebih sering dilakukan oleh kaum pemberontak. Perekrutan tentara anak merupakan kejahatan pada perang, maka dengan ini Houthi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan perekrutan tentara anak sesuai dengan Pasal 10 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts tahun 2001 selain itu juga terdapat pada Pasal 25 ayat (3) Statuta Roma 1998 dan Pasal 28 huruf (a) Statuta Roma 1998 dengan menerapkan tanggung jawab individu dan tanggung jawab komando.

Kata Kunci— Belligerent, Perekrutan Tentara Anak, Houhti, Tanggung Jawab

I. PENDAHULUAN

Konflik antar Negara dengan Negara dan atau Negara dan aktor non-Negara merupakan sesuatu yang tak dapat dihindarkan dalam kehidupan bernegara. Konflik yang marak terjadi pada saat ini ialah terjadi pada Negara dengan kelompok bersenjata yang terorganisir atau yang bersifat konflik bersenjata non – internasional. Akibat perang ini, korban warga sipil dari tahun ke tahun kian meningkat. Meskipun perang sudah diatur sedemikian rupa di dalam konvensi – konvensi dan protokol yang telah dibuat oleh masyarakat internasional, namun masih banyak terjadi pelanggaran- pelanggaran dalam pelaksanaannya perang itu sendiri. Salah satu bentuk pelanggaran itu ialah berupa perekrutan anak untuk dijadikan sebagai tentara

Perekrutan tentara anak secara jelas sudah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Terdapat sebuah aktor non-Negara yang melakukan perekrutan tentara anak yaitu Houthi pada konflik bersenjata di Yaman. Houthi sendiri adalah aktor non-Negara yang melakukan pemberontakan domestic selama bertahun – tahun dan berimbas hingga ke internasional. Berdasarkan laporan Human Rights Council terkait situasi HAM di Yaman diperoleh data bahwa antara Juni 2015 sampai Februari 2020, Houthi merekrut anak laki-laki paling muda berusia 7 tahun sebanyak 163 anak dari sekolahan, keluarga miskin, atau indoktrinasi yang kemudian dijadikan kombatan. Sedangkan untuk anak perempuan, Houthi merekrut 34 anak dengan kisaran umur 13-17 tahun yang kemudian dimanfaatkan sebagai mata-mata, perekrut anak-anak lain, paramedis, atau penjaga. Jumlah data ini lebih sedikit dibandingkan data milik Organisasi Seyaj yang berbasis di Sana'a Yaman. Artinya angka pada laporan tahunan Human Rights Council ini bisa lebih besar lagi. Namun, pada kasus perekrutan tentara anak oleh Houthi pada konflik bersenjata di Yaman ini belum adanya pertanggungjawaban. Sejak tahun 1970-an, sejumlah konvensi internasional yang berlaku mencoba membatasi partisipasi anak pada konflik bersenjata. Pada dasarnya perekrutan tentara anak melanggar pasal yang terdapat beberapa konvensi dan protokol internasional.

Dari pemaparan diatas Houthi terindikasi melakukan pelanggaran pada hukum internasional, hukum pidana

internasional dan juga hukum humaniter internasional. Namun pengaturan instrumen hukum internasional cenderung menitikberatkan pada kewajiban subjek hukum Negara, padahal kasus perekrutan anak sebagai tentara paling banyak dilakukan oleh kelompok bersenjata non – Negara. Inilah yang menyebabkan tidak jelasnya pengaturan hukum internasional untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pada kelompok bersenjata non-Negara. Selain dari itu hal, ini harus menjadi perhatian masyarakat internasional guna melindungi generasi agar kedepannya tidak terjadi lagi hal serupa yang menyebabkan anak sebagai korban pada konflik bersenjata.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “ Bagaimanakah status Houthi menurut hukum internasional?” dan “Bagaimanakah tanggung jawab Houthi terhadap pelibatan tentara anak pada konflik bersenjata di Yaman?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah status Houthi menurut hukum internasional dan untuk mengetahui tanggung jawab Houthi terhadap perekrutan tentara anak pada konflik bersenjata di Yaman.

II. LANDASAN TEORI

Subjek hukum internasional terdiri dari Negara dan bukan Negara, subjek yang bukan negara terdapat Tahta Suci (Vatikan), Palang merah Internasional, Organisasi Internasional, orang perorangan (individu), pemberontak (Belligerent). Untuk mendapatkan status sebagai subjek hukum internasional yaitu belligerent atau pemberontak haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu. Belligerent atau pemberontak merupakan salah satu dari subjek hukum internasional yang bukan Negara. Belligerent merupakan suatu bentuk terakhir dari suatu pemberontakan atau separatisme. Suatu kelompok dapat dikatakan sebagai belligerent atau pemberontak haruslah didasarkan pada beberapa syarat yang telah diatur pada beberapa peraturan seperti pada Pasal 1 Hague Regulation Konvensi Den Haag IV, Pasal 13 ayat (2) Konvensi Jenewa I Tahun 1949 dan juga pada Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1907 yang menyebutkan mengenai syarat sebagai suatu pemberontak yaitu dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, memiliki lambang khas yang dapat dikenali dari jauh, membawa senjata secara terang – terangan, dan melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Sedangkan menurut Oppenheim – Lauterpacht menambahkan syarat diakuinya suatu kaum sebagai belligerent adalah adanya peperangan sipil yang diikuti dengan pertikaian terbuka, adanya pendudukan wilayah tertentu dan penyelenggaraan pengaturan dan adanya Negara ketiga yang menyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut.

Pada konflik bersenjata yang bersifat non – internasional ini marak terjadinya perekrutan anak untuk dijadikan tentara. Pembatasan perekrutan anak dimuat pada beberapa konvensi internasional, seperti pada Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang terdapat pada Pasal 38 yaitu Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan

anak-anak dalam konflik bersenjata Tahun 2000 pada Pasal 1,2,3,4, dan 6. Selain itu juga, terdapat pada Konvensi ILO 182 tentang Bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak (International Labour Organization Convention No. 182 Concerning The Worst Forms of Child Labour) terdapat pada Pasal 22 ayat (2). Pada hukum humaniter internasional terdapat pada Protokol Tambahan I 1977 pada Pasal 77 ayat (2) dan Protokol Tambahan II 1977 terdapat pada Pasal 4 ayat (3) huruf (c) dan pada Hukum Pidana Internasional terdapat pada Statuta Roma 1998 pada Pasal 8 huruf (e) angka (vii) statuta.

Pada kasus perekrutan tentara anak ini menyebabkan pertanggungjawaban. Dalam hal bentuk – bentuk pertanggungjawaban belligerent atau non- state entities atas setiap pelanggaran maupun kejahatan saat perang, hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional. mengaturnya dalam bagian Draft Article ke 2. Bagian ke 2 Draft Article berkaitan dengan substansi dari tanggung jawab Negara, yaitu kewajiban – kewajiban yang timbul sebagai pertanggungjawaban dari tanggung jawab Negara. Draft Article mengingatkan kita kewajiban penggantian rugi berlaku juga pada kasus pelanggaran hukum humaniter internasional yang mengatur konflik bersenjata non– internasional. ILC menekankan bahwa kewajiban tersebut juga mungkin berlaku terhadap orang atau Aktor Non– Negara. Misalnya, pada kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional lainnya dimana penerima manfaat utama dari kewajiban dilanggar tersebut bukan suatu Negara. Sebuah ketentuan tambahan menghubungkan perilaku entitas bukan Negara atau individu dalam suatu Negara adalah Draft Pasal 10. Pada prinsipnya, hukum humaniter dan hukum pidana internasional menerapkan pertanggungjawaban individu yang melepaskan perbuatan individu dengan tindakan Negara. Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma yaitu mahkamah mempunyai yurisdiksi atas orang sesuai dengan Statuta ini. Seseorang yang melakukan kejahatan pada yurisdiksi, Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai pada statuta ini. Maka dari itu, penerapan tanggung jawab nya yaitu tanggung jawab individu. Selanjutnya pada Pasal 28 huruf (a) Statuta Roma 1998 dengan menerapkan tanggung jawab komando.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Status hukum memiliki arti yang sangat penting, karena akan menentukan atau terkait dengan hak, tanggung jawab dan kewenangan. Berbicara status hukum, maka dalam hukum internasional kita berbicara tentang status hukum atas suatu entitas apakah entitas yang yang dimaksud dapat digolongkan sebagai subjek hukum atau tidak. Subjek hukum internasional menurut F. Sugeng Istanto menyatakan bahwa subjek hukum internasional adalah, Negara, organisasi internasional dan individu. Subjek hukum tersebut masing – masing mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang berbeda satu sama lain.

Sebuah kelompok bersenjata yang kemudian menjadi *belligerent* perlu diakui sebagai subjek hukum internasional

karena memiliki hak yang sama dengan apa yang dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya. *Belligerent* dibebankan hak seperti dapat menentukan nasibnya sendiri, memilih sistem ekonomi, politik dan sosial sendiri, dan dapat menguasai sumber kekayaannya yang berada pada wilayah yang didudukinya. Para pemberontak sebagai kelompok maupun gerakan yang dapat diberikan hak – hak tersebut sebagai pihak yang sedang dalam keadaan berperang dalam perselisihannya dengan pemerintah yang sah, meskipun tidak dalam artian organisasi kompleks seperti Negara. Kelompok Houthi mendapatkan dukungan dari Negara Iran sedangkan lawannya yaitu pemerintahan Yaman disokong oleh Negara Saudi Arabia. Hal ini diduga terjadi akibat adanya aliran sepemahaman antara masing – masing pendukung. Hingga saat ini Houthi masih menduduki beberapa wilayah di Yaman dan antara Houthi dan pemerintahan Yaman terus terjadi, namun konflik yang terjadi menjadi berkembang bermula dari Houthi dengan pemerintahan Yaman, kemudian Houthi dengan Arab Saudi, dapat terlihat bahwa Houthi juga melaksanakan serangan terhadap Arab Saudi.

Konflik yang terjadi di Yaman yang disebabkan perang antara pemerintah Yaman dengan kelompok Houthi ini menyebabkan warga sipil yang turut menjadi korban. Terhitung pada April 2010, Houthi memiliki lebih dari 100.000 pengikut, meski yang terjadi kini tentu lebih dari jumlah tersebut. Di antara pengikut-pengikut tersebut, kelompok Houthi juga melibatkan anak-anak sebagai bagian dari pejuang.

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana adanya kewajiban untuk menanggung atas segala sesuatunya yang timbul dari suatu perbuatan baik kelalaian ataupun kesalahan. Tanggung jawab internasional terdapat pada beberapa jenis, salah satunya yaitu tanggung jawab atas kejahatan internasional, dimana tanggung jawab ini didasari atas perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut telah diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat internasional. Kejahatan internasional biasa disebut dengan pidana internasional.

Perekrutan tentara anak oleh Houthi merupakan suatu kejahatan yang telah diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini dibuktikan dengan berbagai konvensi yang melarang perekrutan tentara yang berusia di bawah 18 tahun, seperti dalam konvensi – konvensi berikut:

1. Konvensi Hak Anak Tahun 1989 Pasal 38, yang menyatakan anak manapun yang berusia dibawah 15 tahun tidak boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata. Anak di zona perang harus menerima perlindungan khusus.
2. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak – anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000 Pasal 1, 2, 3, dan 4, dalam protokol ini menyatakan mengenai kewajiban

negara untuk memastikan bahwa anak yang berusia dibawah 18 tahun tidak terlibat pada konflik bersenjata. *Protocol* ini perbaikan dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang menyatakan bahwa usia batas minimum perekrutan tentara anak adalah pada usia 15 tahun. Pada Pasal 6 mengatur mengenai kewajiban negara peserta untuk memastikan bahwa ketentuan pada protokol ini dilaksanakan secara efektif dan mempunyai kekuatan mengikat di bawah yurisdiksinya.

3. Konvensi ILO 182 Tahun 1999 tentang Bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak Pasal 3 ayat (a) yang menyatakan segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak – anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak – anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
4. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 Pasal 77 ayat (2), yang menyatakan bahwa pada pihak dalam konflik harus mengambil semua langkah yang memungkinkan agar anak yang belum mencapai 15 Tahun tidak menjadi bagian langsung dalam permusuhan dan, khususnya mereka harus menahan diri dari merekrut mereka ke dalam angkatan bersenjata mereka, dalam merekrut diantara orang-orang yang telah mencapai usia lima belas tahun tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun, para pihak dalam sengketa harus berusaha untuk memberikan prioritas kepada mereka yang paling tua.
5. Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977 Pasal 4 ayat (3) Huruf (c), yang menyatakan bahwa anak yang berusia 15 tahun tidak diperbolehkan untuk direkrut menjadi anggota angkatan bersenjata dan tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pertikaian bersenjata.
6. Statuta Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*) Tahun 1988 Pasal 8 huruf (e) angka (vii), yang mengatakan menyatakan bahwa salah satu unsur dari kejahatan perang yang merupakan yurisdiksi ICC adalah perekrutan anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai tentara.

Beberapa ahli menaruh perhatian pada rezim yang sudah ada dari tanggung jawab Negara dan tanggung jawab individu, yang menyatakan bahwa meskipun rezim tersebut tidak menangani pelanggaran kelompok perlawanan bersenjata secara langsung, rezim ini membantu mengatasi permasalahan yang ada secara tidak langsung, biasanya tanggung jawab pada hukum internasional menitikberatkan kepada tanggung jawab Negara.

Mengenai persoalan tanggung jawab pada hukum internasional tanggung jawab atas tindakan kelompok bersenjata atau *belligerent* terdapat pada Pasal 10 *Draft*

Articles tentang Tanggung Jawab Negara Atas Tindakan Pelanggaran Internasional Tahun 2001, menyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan gerakan pemberontakan yang menjadi Pemerintahan yang dalam suatu Negara akan dianggap sebagai tindakan dari Negara tersebut di bawah hukum internasional.
2. Pelaksanaan gerakan, pemberontakan atau lainnya, yang berhasil mendirikan Negara baru di bagian wilayah suatu Negara yang sudah ada atau dalam wilayah di bawah pemerintahannya akan dianggap sebagai tindakan Negara baru di bawah hukum internasional.

Penjelasan *International Law Commission* menegaskan bahwa “Ambang batas untuk penerapan hukum konflik bersenjata yang terkandung pada Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977 dapat diambil sebagai panduan.”

Untuk dapat memenuhi pertanyaan siapakah yang harus mempertanggungjawabkan tindakan yang melanggar tersebut, sudah dijelaskan bahwa suatu kelompok perlawanan yang termasuk ke dalam gerakan pemberontakan yang dapat mengakibatkan konflik bersenjata non-internasional adalah gerakan pemberontakan yang bergerak atas suatu komando yang bertanggung jawab.

Pada Pasal 4 *Draft Article* tentang Tanggung Jawab Negara Atas Tindakan Pelanggaran Internasional Tahun 2001 disebutkan bahwa;

1. Perilaku para organ Negara akan dianggap sebagai tindakan dari Negara tersebut menurut hukum internasional, apakah sebagai organ legislatif, eksekutif, yudikatif, atau fungsi lainnya, posisi apapun berlaku dalam organisasi Negara, dan apapun karakternya sebagai organ pemerintah pusat atau unit teritorial Negara.
2. Sebuah organ termasuk setiap orang atau badan yang memiliki status sesuai dengan hukum nasional Negeranya.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa, subjek hukum internasional yang bukan Negara dalam hal ini khususnya adalah kelompok bersenjata atau *belligerent* dapat secara penuh bertanggung jawab atas setiap tindakan yang melanggar hukum internasional khususnya pada hukum humaniter internasional. Seperti halnya pertanggungjawaban oleh Negara atas perbuatan organnya.

Selain pertanggungjawaban atas kelompok bersenjata atau *belligerent* yang diatur pada hukum internasional pertanggungjawaban atas kelompok bersenjata atau *belligerent* juga terdapat pada hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, hubungan antara kedua aspek ini disebut sebagai aliran New York. Pada prinsipnya pada hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional menerapkan pertanggungjawaban individu yang melepaskan perbuatan individu dengan tindakan Negara. Yurisdiksi daripada ICC terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma yaitu:

1. Kejahatan genosida;

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan;
3. Kejahatan perang;
4. Kejahatan agresi

Perekritan tentara anak merupakan salah satu yang termasuk pada kejahatan perang. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii) yaitu memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak – anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif pada pertikaian. Maka Statuta Roma Tahun 1998 dapat digunakan.

Statuta Roma menerapkan pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban individu. Prinsip tanggung jawab pidana secara individual, sekarang ini merupakan prinsip yang telah diakui dalam hukum internasional. Pertanggungjawaban individu pada Statuta Roma terdapat pada Pasal 25 ayat (3) Statuta Roma Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa setiap orang bersalah dan dapat dihukum di hadapan ICC apabila:

1. Melakukan kejahatan;
2. Memerintahkan, mengajak, atau mempengaruhi melakukan tindakan kejahatan;
3. Dengan sengaja memfasilitasi, membantu, bersekongkol, atau mendukung tindakan kejahatan, dan/atau;
4. Dengan cara lain berkontribusi pada tindakan kejahatan oleh sekelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang sama.
5. Selain tanggung jawab individu berlaku juga tanggung jawab komando. Pertanggungjawaban komandan diatur pada Pasal 28 huruf (a) Statuta Roma Tahun 1998 yaitu Komandan yang berwenang dianggap bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan perang yang telah dilakukan oleh bawahan mereka atau ketika gagal mencegah kejahatan tersebut. Secara keseluruhan konsep dari pertanggungjawaban komando,

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa, subjek hukum internasional bukan Negara atau aktor non-Negara dalam hal ini khususnya kelompok bersenjata pada konflik bersenjata atau disebut juga dengan *belligerent* dapat secara penuh bertanggung jawab atas setiap tindakan yang melanggar hukum internasional khususnya pada hukum humaniter internasional seperti halnya pertanggungjawaban oleh Negara atas perbuatan organnya.

Begitu pula pada kasus perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Houthi, kelompok bersenjata Houthi berada dibawah suatu komando dan memiliki kontrol atas wilayah di dalam wilayah suatu Negara maka Houthi dapat dimintai pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban oleh Houthi sebagai kelompok bersenjata atau *belligerent* yaitu berupa pertanggungjawaban secara individu ataupun secara komando atau komandan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Houthi dalam hukum internasional berstatus sebagai belligerent karena telah mendapatkan dukungan dan pengakuan dari negara lain. Perekrutan tentara anak oleh Houthi pada konflik bersenjata non-internasional di Yaman terhitung dari Juni 2015 hingga Februari 2020, Houthi telah merekrut anak sebanyak 163 anak yang direkrut dari sekolah, keluarga miskin ataupun indoktrinasi yang kemudian dijadikan kombatan. Atas tindakan perekrutan tentara anak ini Houthi telah melanggar beberapa peraturan internasional yaitu, Pasal 38 Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Pasal 1,2,3 dan 4 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak – Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000, Pasal 3 ayat (a) Konvensi ILO 182 tentang Bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak Tahun 1999, Pasal 7 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977, Pasal 4 ayat (3) huruf (c) Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977, dan Pasal 8 huruf (e) angka (vii) Statuta Pengadilan Pidana Internasional Tahun 1998.

Tindakan kelompok Houthi yang melakukan perekrutan tentara anak ini menimbulkan tanggung jawab. Berdasarkan Pasal 10 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Tahun 2001, tanggung jawab dapat dijalankan oleh komando kelompok pemberontak tersebut sejajar dengan bentuk tanggungjawab yang dapat dijalankan oleh suatu negara akibat tindakan dari organnya. Selain tanggung jawab komando, tanggung jawab melalui hukum humaniter yang dilakukan melalui penerapan hukum pidana internasional tentang kejahatan perang. Melalui hukum pidana internasional, individu ditempatkan sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukan hal ini berdasarkan pada Pasal 25 ayat (3) Statuta Roma Tahun 1998 dan berdasarkan Pasal 28 huruf (a) Statuta Roma Tahun 1998 tanggung jawab yaitu tanggung jawab komando.

V. SARAN

Upaya perlindungan terhadap hak anak pada konflik bersenjata seharusnya lebih mendapatkan perhatian terutama pada konflik bersenjata yang bersifat non-internasional agar anak-anak tidak menjadi korban konflik bersenjata. Hal ini karena anak merupakan individu yang sangat rentan maka tidak seharusnya dilibatkan dalam konflik bersenjata yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Dianjurkan pembentukan aturan khusus mengenai batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh kelompok perlawanan khususnya pada kelompok bersenjata yang menjadi pihak dalam konflik bersenjata non-internasional dan tanggungjawab yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran pada aturan – aturan tersebut baik berbentuk dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Assembly Of States Parties To The Rome Statute Of The International Criminal Court. Session. (2009). Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court :

- eighth session, The Hague, 18-26 November 2009 : official records. The Hague New York: International Criminal Court Publication.
- [2] Haryomataram. Hukum Humaniter. Jakarta: Rajawali Press. 1984.
- [3] Human Rights Council, Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014, Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights A/HRC/45/6, Oktober 202.
- [4] Lancet Medical Journal. Post- Traumatic Stress in Former Uganda Child Soldiers. 2004
- [5] Permanasari, Arlina. Pengantar Hukum Humaniter, dalam Any Farida et al, Hukum Humaniter Internasional kontemporer, 2015, Hlm. 124
- [6] UNICEF, Adult Wars, Child Soldiers (Bangkok: UNICEF,2002). Diakses pada 24 Februari 2021 pada pukul 12.00. <http://www.UNICEF.org/emerg/AdultWarsChildSoldiers.pdf> diakses pada 24 Februari 2021 pukul 13.00. <https://www.child-soldiers.org/news/child-soldiers-world-index-reveals-shocking-scale-of-childrecruitment-around-the-world>.
- [7] UPI. (2010, January 6). Yemen’s child soldiers go to war. Diakses pada April 3, 2021, from UPI website: https://www.upi.com/Top_News/Special/2010/01/06/Yemens-child-soldiers-go-to-war/89571262808410/%3Fur3%3D1&usg=ALkJrhgqIU-DPBuOA4SH-Ex4XF4HeszwqQ
- [8] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Riset Ilmu Hukum.* 1(1). 6-10